



### Kolaborasi dengan BPJPH, Kemendag Bantu Sertifikasi Halal untuk UKM Ekspor

**Jakarta, 28 April 2021** – Kementerian Perdagangan terus berupaya mendorong kinerja ekspor nasional, salah satunya dengan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap peranan sertifikasi halal. Untuk itu, Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar Lokakarya Diversifikasi dan Adaptasi Produk Ekspor pada Jumat lalu (23/4).

*“Melalui lokakarya ini, diharapkan para pelaku UKM dapat meningkatkan pemahaman peranan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dalam membuka peluang ekspor. Sertifikasi halal untuk ekspor juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global,”* ungkap Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan pada kesempatan terpisah.

Lokakarya mengusung tema "Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Ekspor Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia". Kegiatan ini diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, asosiasi, dan para pelaku usaha, termasuk UKM.

Turut hadir menjadi pembicara yaitu Atase Perdagangan Brussels Merry Indriasari, Kepala *Indonesian Trade Promotion Center* Jeddah Rivai Abbas, Plt. Kepala BPJPH Mastuki, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi BPJPH Sri Ilham Lubis, dan Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati.

Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag Olvy Andrianita menjelaskan dalam sambutannya, Pengembangan pasar tujuan ekspor produk halal Indonesia tidak hanya ditujukan ke negara mayoritas penduduknya muslim, tapi juga nonmuslim. *“Pasar ekspor produk halal Indonesia masih didominasi ke negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir. Namun demikian, peluang dan potensinya masih terbuka lebar karena semakin meningkatnya konsumen produk halal di negara-negara mayoritas nonmuslim di Amerika dan Eropa serta diaspora Indonesia di luar negeri. Di samping itu, potensi produk halal Indonesia juga harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umroh di Arab Saudi”*, ujar Olvy.

Olvy menambahkan, sertifikasi produk halal menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing produk ekspor di negara tujuan ekspor. *“Peran sertifikasi ekspor seperti HACCP, ISO 22000:2018, sertifikasi kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal menjadi kunci peningkatan daya saing dan sebagai suatu strategi menjaga dan mengembangkan pasar dan produk ekspor. Selain itu, sertifikasi ekspor, termasuk produk halal, berperan penting dalam meningkatkan kapasitas UKM ekspor Indonesia. Untuk itu, kolaborasi antara Kemendag dengan BPJPH menjadi strategis di masa pandemi Covid-19”* tegas Olvy.

BPJPH saat ini melalui *Halal Industry Development Plan* sangat menekankan faktor *sourcing* atau hulu dari bahan baku halal sebagai pangkal rantai nilai produksi. Mastuki menyampaikan, UMKM diberikan kemudahan melalui aturan PP 39/2021 untuk melakukan deklarasi mandiri sertifikat halal (*halal self declare*). Syaratnya, di antaranya, didampingi oleh ormas keagamaan, perguruan tinggi, atau kementerian dan lembaga.

*"Diperlukan sinergi dan kolaborasi untuk menaikkan kelas UKM dan orientasi ekspor, oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting bagi produk yang dihasilkan UKM dalam peningkatan daya saing,"* lanjut Mastuki.

Sejalan dengan itu, Sri Ilham Lubis menjelaskan, sertifikasi halal saat ini telah menjadi salah satu andalan lini bisnis di banyak negara Islam. Untuk mewujudkan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia dalam *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019--2024, pemerintah berfokus pada penguatan empat strategi utama, yaitu rantai nilai halal, keuangan syariah, UMKM, dan ekonomi digital.

*"Untuk mempercepat ekspor, perlu kolaborasi berbagai pihak untuk mengidentifikasi daftar produk dan jenis barang yang diminati dengan memetakan negara tujuan fokus ekspor,"* jelas Sri.

Adapun Muti Arintawati menjelaskan, beberapa negara telah mengakui dan melakukan kerja sama antarpemerintah untuk saling keberterimaan. Untuk itu, produk halal Indonesia diekspor perlu dilengkapi dengan *confirmation letter*. *"Sertifikasi halal tidaklah sulit seperti yang dibayangkan. Beberapa hal harus dipersiapkan, seperti mengetahui informasi secara lengkap, memahami proses halal, dan menyiapkan bahan halal. Akan lebih mudah bila dilakukan melalui saluran bersama, seperti asosiasi dan gabungan pengusaha,"* jelas Muti.

Dalam lokakarya tersebut, perwakilan perdagangan Indonesia berkesempatan memaparkan persoalan sertifikasi halal di tempat masing-masing. Pertumbuhan ekonomi syariah dan halal di Eropa pada 2019 mencapai USD 84,78 miliar dengan kontribusi 80 persen dari sektor makanan dan minuman. Capaian itu meningkat 6 persen pada 2020. Merry menjelaskan, populasi muslim Belgia sebesar 7,6 persen atau sekitar 880 ribu jiwa, sementara populasi muslim Luksemburg 3,2 persen dari total jumlah penduduknya.

*"Pangsa pasar produk halal di Belgia terbagi dua area. Pertama, area Flemish sebesar USD 1,87 miliar tumbuh lebih tinggi dibanding produk organik. Selain itu, masyarakat lebih tertarik untuk membeli Green Halal (daging) dan produk dengan sertifikasi halal. Kedua, area Wallonia sebesar USD 682 juta yang terdapat klaster 'Halal Club' dengan 75 perusahaan anggotanya,"* jelas Merry.

Sementara itu, Rivai menguraikan strategi produk halal Indonesia untuk dapat menembus pasar produk halal Arab Saudi. *"Eksportir harus dapat mengidentifikasi jenis makanan halal yang berpotensi dipasarkan di Arab Saudi khususnya untuk kebutuhan haji dan umroh serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan. Dapat dipertimbangkan pula strategi waralaba atau joint venture dalam berpromosi dan melalui pendirian restoran Indonesia atau menawarkan beberapa merk populer kepada pelaku usaha di Arab Saudi,"* urai Rivai.

--selesai--

*Sumber: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan  
Diolah oleh Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan*